Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

Team project ©2017
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 *Auditing*

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2017), *auditing* adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tentang derajat korespondensi antara informasi dan kriteria yang didirikan. *Audit* harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Untuk melaksanakan *audit*, maka harus terdapat informasi dalam bentuk yang dapat diuji serta beberapa standar (kriteria) yang dapat digunakan oleh auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut. Kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi informasi pun beragam, tergantung dari informasi yang akan diaudit.

Dalam Standar *Audit* (SA) 200 (2017) dinyatakan bahwa tujuan suatu *audit* adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam hal kebanyakan kerangka bertujuan umum, opini tersebut adalah tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka. Suatu *audit* yang dilaksanakan berdasarkan SA dan ketentuan etika yang relevan memungkinkan auditor untuk merumuskan opini (IAPI, 2017).

Heri (2016) menyebutkan bahwa tujuan dari dilakukannya pengauditan atas laporan keuangan adalah untuk meningkatkan keyakinan bagi para pengguna laporan keuangan. Hal ini dicapai melalui sebuah pernyataan atau opini auditor tentang apakah laporan keuangan telah disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam mengembangkan tujuan *audit* atas laporan keuangan, berikut adalah tahapan-tahapan yang akan ditempuh auditor:

1. Memahami tujuan dan tanggung jawab dari suatu pengauditan.
2. Membagi laporan keuangan ke dalam siklus-siklus.
3. Memahami asersi manajemen terkait laporan keuangan yang akan diaudit.
4. Memahami tujuan umum *audit* untuk golongan transaksi, akun, dan pengungkapannya.
5. Memahami tujuan khusus *audit* untuk golongan transaksi, akun, dan pengungkapannya.

Dalam SA 520 (2017) dinyatakan bahwa tujuan auditor dalam merancang prosedur analitis adalah:

1. Untuk mendapatkan bukti *audit* relevan dan andal ketika menggunakan prosedur analitis substantif
2. Untuk merancang dan melaksanakan prosedur analitis mendekati akhir *audit* yang membantu auditor dalam merumuskan kesimpulan keseluruhan apakah

Pengaruh Independensi..., Metta Sari Santoso, FB UMN, 2018

laporan keuangan konsisten dengan pemahaman auditor terhadap entitas (IAPI, 2017)

SA 520 (2017) menyatakan bahwa prosedur analitis mencakup pertimbangan atas perbandingan informasi keuangan entitas dengan, sebagai contoh:

a) Informasi komparatif periode lalu
b) Hasil entitas yang diantisipasi, seperti anggaran atau prakiraan, atau ekspektasi auditor, seperti estimasi penyusutan
c) Informasi industri sejenis, seperti perbandingan rasio penjualan entitas terhadap piutang usaha dengan rata-rata rasio industri atau dengan entitas lain yang memiliki ukuran sebanding dalam industri yang sama

Menurut SA 520 (2017), pada waktu merancang dan melaksanakan prosedur analitis substantif, sendiri atau dalam kombinasi dengan pengujian rinci, sebagai prosedur substantif berdasarkan SA 330, auditor harus:

1. Menentukan kecocokkan prosedur analitis substantif untuk asersi yang tersedia, dengan memperhitungkan resiko kesalahan penyajian material yang ditentukan, dan pengujian rinci, jika ada, untuk asersi-asersi tersebut
2. Mengevaluasi keandalan data yang dijadikan dasar oleh auditor untuk mengembangkan ekspektasi atas jumlah tercatat atau rasio, dengan memperhitungkan sumber, komparabilitas, serta sifat dan relevansi informasi yang tersedia, dan pengendalian atas penyusunannya

3. Mengembangkan ekspektasi atas jumlah tercatat atau rasio dan mengevaluasi apakah ekspektasi tersebut telah cukup tepat untuk mengidentifikasi kesalahan penyajian, baik secara individu atau ketika diagregasikan dengan kesalahan penyajian lainnya, dapat menyebabkan terjadinya kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan
4. Menentukan jumlah perbedaan antara jumlah tercatat dengan nilai yang diharapkan yang dapat diterima tanpa memerlukan investigasi lebih lanjut

Untuk memenuhi tujuan *audit*, auditor harus mendapatkan bukti *audit* yang berkualitas dan cukup. Auditor harus menentukan jenis dan jumlah bukti yang diperlukan dan mengevaluasi apakah informasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan (Arens, Elder, dan Beasley, 2017).

Arens, Elder, dan Beasley (2017) menjelaskan bahwa terdapat 3 tipe *audit*, yaitu:

a) *Audit* Operasional

Mengevaluasi efisiensi dan efektivitas prosedur dan metode operasional organisasi. Saat *audit* operasional selesai dilaksanakan, manajemen biasanya akan mengharapkan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan kegiatan operasional perusahaan. Tinjauan yang dibuat tidak hanya terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup pula evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, serta banyak

Pengaruh Independensi..., Metta Sari Santoso, FB UMN, 2018

area *audit* lainnya sesuai dengan kualifikasi auditor. *Audit* operasional lebih dikategorikan sebagai konsultasi manajemen daripada sebagai *auditing*.

b) *Audit* Kepatuhan

Audit yang bertujuan untuk menentukan apakah klien (auditor) telah mengikuti prosedur, tata cara, serta peraturan yang dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil *audit* kepatuhan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan pengguna luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang peduli dengan tingkat kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang ditentukan.

c) *Audit* Atas Laporan Keuangan

Audit yang dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang diuji) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Dalam menentukan apakah laporan keuangan dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi, auditor mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah pernyataan mengandung kesalahan material atau salah saji lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 Pasal 10 dinyatakan bahwa:

(1) Akuntan publik memberikan jasa asurans, yang meliputi:

a) *Audit* atas informasi keuangan historis

b) Jasa reviu atas informasi keuangan historis

Pengaruh Independensi..., Metta Sari Santoso, FB UMN, 2018

c) Jasa asurans lainnya

(2) Selain jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akuntan publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 Pasal 11 menyatakan bahwa (1) Pemberian jasa *audit* atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

(2) Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a) Industri di sektor Pasar Modal
b) Bank umum
c) Dana pensiun
d) Perusahaan asuransi/reasuransi
e) Badan Usaha Milik Negara

(3) Pembatasan pemberian jasa *audit* atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi Akuntan Publik yang merupakan Pihak Terasosiasi.

(4) Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa *audit* atas informasi keuangan historis terhadap entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.

2.2 Kualitas *Audit*

Kualitas *audit* merupakan kualitas hasil kerja auditor dalam mengevaluasi kewajaran pada laporan keuangan klien dan melaporkannya (Hasibuan, 2010) dalam (Fietoria dan Manalu, 2016). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dalam Dwimilten dan Riduwan (2015) mengungkapkan kualitas hasil pemeriksaan adalah laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian *intern*, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, ketidakpatutan, harus dilengkap tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta tindakan koreksi yang direncanakan. Dalam meningkatkan kualitas *audit*, akuntan publik atau auditor independen dalam menjalankan tugasnya harus memegang prinsip-prinsip profesi. Auditor harus memiliki kualitas *audit* yang memadai sehingga dapat mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antara manajemen dengan pemegang saham karena pengguna laporan terutama pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah diaudit oleh auditor (Fietoria dan Manalu, 2016). Kualitas *audit* memiliki dua indikator, yaitu:

1. Kesesuaian pemeriksaan dengan standar *audit*
2. Kualitas laporan hasil pemeriksaan

Menurut SA 200 (2017) auditor harus memenuhi ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan independensi, sehubungan dengan perikatan *audit* atas laporan keuangan. Ketentuan etika tersebut tercantum dalam

Pengaruh Independensi..., Metta Sari Santoso, FB UMN, 2018

Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, yang terdiri dari bagian A dan bagian B. Bagian A dari kode etik menetapkan prinsip dasar etika profesi yang relevan bagi auditor ketika melaksanakan suatu *audit* atas laporan keuangan dan menyediakan suatu kerangka konseptual untuk menerapkan prinsip dasar tersebut. Prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh auditor menurut kode etik adalah sebagai berikut:

a) Integritas
b) Objektivitas
c) Kompetensi dan kecermatan profesional
d) Kerahasiaan
e) Perilaku profesional

Bagian B dari kode etik memberikan ilustrasi bagaimana kerangka konseptual diterapkan dalam situasi tertentu (IAPI, 2017).

Dalam hubungan dengan sistem pengendalian mutu KAP, tim perikatan bertanggung jawab untuk menerapkan prosedur pengendalian mutu yang dapat diterapkan terhadap perikatan *audit* dan memberikan informasi yang relevan kepada KAP untuk memungkinkan berfungsinya sistem pengendalian mutu KAP yang berhubungan dengan independensi (SA 220, 2017). Menurut Tuanakotta (2015), standar pengendalian mutu yang ditetapkan IAASB tercantum dalam *International Standard on Quality Control* 1 (ISQC 1). Lingkup ISQC 1 adalah pengendalian mutu di KAP yang memberikan:

1. Jasa *audit* dan reviu atas laporan keuangan
2. Jasa asurans lainnya
3. Jasa - jasa yang terkait dengan jasa asurans

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2017), salah satu jasa yang diberikan oleh akuntan publik adalah jasa atestasi. Jasa atestasi adalah jenis jasa asurans di mana akuntan publik menerbitkan laporan tentang materi atau pernyataan yang dibuat oleh pihak lain. Terdapat tiga kategori jasa atestasi, yaitu:

1. *Audit* atas laporan keuangan historis
2. *Audit* pengendalian internal atas pelaporan keuangan
3. *Review* atas laporan keuangan historis
4. Jasa atestasi lainnya yang dapat diterapkan ke berbagai macam pokok bahasan

Menurut Heri (2016), laporan auditor, sebagai tahap akhir dari keseluruhan proses *audit*, sangatlah penting dalam setiap penugasan untuk mengkomunikasikan berbagai hasil temuan auditor eksternal. Para pemakai laporan keuangan mengandalkan laporan auditor untuk mendapatkan asurans atas laporan keuangan tersebut. Auditor akan bertanggung jawab apabila laporan *audit* yang diterbitkannya tidaklah tepat.

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

1. Laporan *audit* standar wajar tanpa pengecualian

   Diterbitkan oleh akuntan publik (auditor eksternal) apabila semua kondisi *audit* telah terpenuhi dan tidak ada salah saji yang signifikan serta laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi.

2. Laporan *audit* wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata

   Laporan ini adalah laporan wajar tanpa pengecualian, dimana laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tetapi auditor merasa perlu atau wajib untuk memberikan informasi tambahan. Berikut adalah penyebab paling penting dari penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata pada laporan *audit* wajar tanpa pengecualian:

   a. Tidak diterapkannya secara konsisten standar akuntansi
   b. Adanya keraguan yang substansial mengenai kesinambungan usaha atau kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*)
   c. Auditor menyetujui penyimpangan dari standar akuntansi
   d. Diperlukannya penekanan atas suatu hal atau masalah
   e. Laporan yang melibatkan auditor lain

3. Laporan pendapat wajar dengan pengecualian

   Laporan pendapat wajar dengan pengecualian diterbitkan apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar, tetapi terdapat pembatasan dalam ruang lingkup *audit* (kondisi 1) atau

kelalaian dalam mematuhi standar akuntansi (kondisi 2). Laporan pendapat wajar dengan pengecualian diterbitkan apabila kondisi 1 atau kondisi 2 terjadi secara material, namun tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Apabila kondisi 1 bersifat sangat material sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan, maka harus diterbitkan laporan menolak memberikan pendapat. Apabila kondisi 2 bersifat sangat material sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan, maka harus diterbitkan laporan pendapat tidak wajar. Untuk kondisi 3 (auditor tidak independen), laporan menolak memberikan pendapat harus diterbitkan tanpa melihat tingkat materialitasnya.

4. Laporan pendapat tidak wajar

   Laporan pendapat tidak wajar diterbitkan hanya apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji yang sangat material sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau hasil operasi dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi. Laporan pendapat tidak wajar hanya dapat diterbitkan apabila auditor memiliki informasi (pengetahuan), setelah melakukan investigasi yang mendalam, bahwa tidak ada kesesuaian dengan standar akuntansi.

5. Laporan menolak memberikan pendapat

   Laporan menolak memberikan pendapat diterbitkan apabila auditor tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan klien secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Kebutuhan untuk menolak

Pengaruh Independensi..., Metta Sari Santoso, FB UMN, 2018

memberikan pendapat akan timbul apabila terdapat pembatasan ruang lingkup *audit* (kondisi 1) yang sangat material sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan atau terdapat hubungan yang tidak independen antara auditor dengan kliennya (kondisi 3) tanpa melihat tingkat materialitasnya. Kedua kondisi tersebut sangat menghalangi auditor untuk dapat memberikan opini atas laporan keuangan secara keseluruhan (Heri, 2016).

Terdapat berbagai pihak eksternal maupun internal yang berkepentingan terhadap informasi yang tersaji dalam laporan keuangan untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu informasi yang tersaji harus dapat diandalkan, akurat, dan terpercaya. Serta informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus dapat dipercaya maka dibutuhkan suatu pengesahan oleh pihak ketiga yang independen sebagai orang yang menjembatani pihak-pihak yang berkepentingan, biasanya orang yang dipakai sebagai pihak ketiga tersebut adalah auditor (Hastuti, 2010) dalam (Tarigan dan Susanti, 2013). Apabila ini dapat disadari oleh profesi auditor di Indonesia, maka kualitas *audit* akan meningkat, pemahaman dan perilaku auditor untuk mengumpulkan bukti-bukti *audit* yang disertai dengan pemahaman dan keyakinan moral yang penuh, yang berarti dalam proses pengumpulan bukti-bukti, auditor harus senantiasa memiliki dan memelihara skeptisme profesionalnya terhadap semua informasi dan pernyataan lisan maupun tulisan dari klien yang diauditnya, bukti *audit* yang

Pengaruh Independensi..., Metta Sari Santoso, FB UMN, 2018

diperoleh memiliki pemahaman dan keyakinan sebagai dasar dalam pemberian opini akuntan (Suraida, 2005) dalam (Tarigan dan Susanti, 2013).

Seorang auditor yang memiliki kecerdasan emosional akan memiliki sikap empati sehingga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan kliennya dan juga akan selalu dapat memotivasi dirinya untuk senantiasa berkomitmen terhadap kualitas *audit*. Kecerdasan emosional membuat auditor terampil dalam berkomunikasi sehingga dapat memperoleh informasi yang membuatnya semakin memahami kondisi perusahaan kliennya. Pemahaman yang lebih baik akan membuat auditor mengambil keputusan-keputusan *audit* yang lebih baik. Uraian diatas menunjukkan adanya interaksi antara kompetensi auditor dengan kecerdasan emosional yang dimilikinya berpengaruh terhadap kualitas auditnya (Dwiyanti dan Fanani, 2014).

2.3 Independensi

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas *audit* adalah independensi. Independensi adalah kemauan dan kemampuan auditor untuk mempertahankan sikap yang bebas atau tidak terikat oleh kepentingan manapun dan tekanan dari pihak siapapun, termasuk kepentingannya sendiri, dalam menentukan keputusan yang tepat pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil *audit* (Harsanti dan Whetyningtyas (2014).

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

Menurut Tuanakotta (2013), auditor wajib mengembangkan rencana *audit* yang harus meliputi penjelasan tentang:

1. Sifat, waktu, dan luas prosedur penilaian risiko yang direncanakan, sebagaimana ditetapkan ISA 315
2. Sifat, waktu, dan luas prosedur *audit* selanjutnya yang direncanakan pada tingkat asersi, sebagaimana ditetapkan ISA 330
3. Prosedur *audit* lainnya yang direncanakan, sebagaimana diharuskan agar penugasan sesuai dengan ISA (ISA 300.9)

Menurut Rusdiana dan Saptaji (2018), tahap perencanaan *audit* memegang peran penting dalam *audit*. Hal ini karena kesuksesan *audit* sangat ditentukan oleh perencanaan *audit* secara matang. Perencanaan *audit* meliputi pengembangan strategi menyeluruh untuk merencanakan pelaksanaan *audit*. Perencanaan *audit* sangat dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh dalam tahap pertimbangan penerimaan penugasan *audit*. Dalam perencanaan *audit*, auditor harus mempertimbangkan informasi mengenai integritas manajemen, kekeliruan, dan pelanggaran hukum klien dalam merencanakan *audit*. Dalam perencanaan auditnya, auditor harus mempertimbangkan sifat, lingkup, dan saat pekerjaan yang harus dilaksanakan dan harus membuat suatu program *audit* secara tertulis untuk setiap *audit*. Program *audit* harus memuat prosedur *audit* secara rinci, yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai tujuan *audit*. Bentuk program *audit* dan tingkat kerinciannya sangat bervariasi sesuai keadaan. Dalam mengembangkan program

Pengaruh Independensi..., Metta Sari Santoso, FB UMN, 2018

audit, auditor harus berpedoman pada pertimbangan dan prosedur perencanaan auditnya. Selama berlangsungnya *audit*, perubahan kondisi dapat menyebabkan diperlukannya perubahan prosedur *audit* yang telah direncanakan tersebut (Heri, 2016).

Menurut Tuanakotta (2013), auditor wajib memasukkan dalam dokumentasi *audit*, antara lain:

1. Strategi *audit* secara keseluruhan
2. Rencana *audit*
3. Setiap perubahan signifikan selama penugasan *audit engagement* terhadap strategi *audit* secara keseluruhan atau rencana *audit*, dan alasan mengapa perubahan dilakukan (ISA 300.12)

Menurut Tuanakotta (2013), dokumentasi *audit* yang cukup, diharuskan agar auditor yang berpengalaman, yang tidak berhubungan dengan *audit* itu memahami:

1. Sifat, jadwal, waktu, dan luasnya prosedur *audit* yang dilaksanakan
2. Hasil pelaksanaan prosedur tersebut dan bukti *audit* yang diperoleh
3. Hal-hal penting yang timbul selama *audit* berlangsung, kesimpulan yang ditarik, dan kearifan profesional yang diterapkan untuk sampai pada kesimpulan itu (Tuanakotta, 2013).

Auditor yang mempertahankan sikap independensi, maka kualitas *audit* yang dihasilkan akan semakin baik (Harsanti dan Whetyningtyas, 2014). Terdapat dua

Pengaruh Independensi..., Metta Sari Santoso, FB UMN, 2018

aspek independensi yang dimiliki auditor, yaitu independensi dalam sikap mental (*independence in mind*) dan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*) (Trisnaningsih, 2006:6) dalam (Bustami, 2013), masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Independensi dalam sikap mental (*independence in mind*)

   Independensi dalam sikap mental berarti adanya kejujuran di dalam diri akuntan untuk mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak di dalam diri akuntan dalam menyatakan pendapatnya.

b. Independensi dalam penampilan (*independence in appearance*)

   Independensi dalam penampilan berarti adanya kesan dari masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen, sehingga akuntan publik harus menghindari faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya. Independensi dalam penampilan berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap independensi akuntan publik, untuk memperjelas pengertian ini akan diberikan contoh seperti seorang akuntan yang kompeten dan independen akan melakukan *audit* pada sebuah perusahaan yang dewan direksi dan para manajernya adalah saudara atau kerabat dekatnya. Walaupun auditor tersebut benar-benar bersikap independen dalam sikap mentalnya, namun menurut persepsi masyarakat auditor tersebut tidak akan bersikap independen dikarenakan adanya hubungan darah atau kekerabatan yang dapat mengakibatkan rusaknya independensi.

Pengaruh Independensi..., Metta Sari Santoso, FB UMN, 2018

Menurut Rusdiana dan Saptaji (2018), ancaman dalam independensi dapat berbentuk:

a) Kepentingan diri (*self interest*)

Kepentingan diri adalah wujud sifat yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarga dibandingkan dengan kepentingan publik yang lebih luas. Contoh langsung ancaman kepentingan diri untuk akuntan publik antara lain:

1. Kepentingan keuangan dalam perusahaan klien, atau kepentingan keuangan bersama pada suatu perusahaan klien
2. Kekhawatiran berlebihan jika kehilangan suatu klien

Contoh langsung ancaman kepentingan diri untuk akuntan bisnis:

1. Perjanjian kompensasi insentif.
2. Penggunaan harta perusahaan yang tidak tepat
3. Tekanan komersial dari pihak luar perusahaan

b) Reviu diri (*self review*)

Contoh ancaman *review* diri untuk akuntan publik antara lain:

1. Temuan kesalahan material saat dilakukan evaluasi ulang
2. Pelaporan operasi sistem keuangan setelah terlibat dalam perancangan dan implementasi sistem tersebut.

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Salah satu contoh ancaman *review* diri untuk akuntan bisnis yaitu keputusan bisnis atau data yang sedang ditinjau oleh akuntan profesional yang sama, yang membuat keputusan bisnis atau penyiapan data tersebut.

c) Advokasi (*advocacy*)

Ancaman advokasi dapat timbul jika akuntan profesional pendukung suatu posisi atau pendapat sampai titik yang mengompromikan objektivitas. Contoh langsung ancaman untuk akuntan publik antara lain:

1. Mempromosikan saham perusahaan publik dari klien, artinya perusahaan tersebut merupakan klien *audit*
2. Bertindak sebagai pengacara (penasihat hukum) untuk klien penjaminan dalam suatu litigasi atau perkara perselisihan dengan pihak ketiga.

d) Kekerabatan (*familiarity*)

Ancaman kekerabatan timbul dari kedekatan hubungan sehingga akuntan profesional menjadi terlalu bersimpati terhadap kepentingan orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan akuntan tersebut. Contoh langsung ancaman kekerabatan untuk akuntan publik antara lain:

1. Anggota tim mempunyai hubungan keluarga dekat dengan seorang direktur atau pejabat perusahaan klien

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

2. Anggota tim mempunyai hubungan keluarga dekat dengan seorang karyawan klien yang memiliki jabatan yang berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pokok dari penugasan

Contoh langsung ancaman kekerabatan untuk akuntan bisnis antara lain:

1. Hubungan yang lama dengan rekan bisnis yang mempunyai pengaruh pada keputusan bisnis
2. Penerimaan hadiah atau perlakuan khusus, kecuali nilainya tidak signifikan

e) Intimidasi (*intimidation*)

Ancaman intimidasi dapat timbul jika akuntan profesional dihalangi untuk bertindak objektif, baik secara nyata maupun dipersepsikan. Contoh ancaman intimidasi untuk akuntan publik antara lain:

1. Diancam dipecat atau diganti dalam hubungannya dengan penugasan klien
2. Diancam dengan tuntutan hukum
3. Ditekan secara tidak wajar untuk mengurangi ruang lingkup pekerjaan dengan maksud untuk mengurangi biaya

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

Contoh ancaman intimidasi untuk akuntan bisnis antara lain:

1. Ancaman pemecatan akuntan profesional dalam bisnis atau anggota keluarga dekat atas ketidaksetujuan penerapan prinsip akuntansi atau cara penerapannya
2. Seseorang yang mempunyai kepribadian yang dominan berusaha mempengaruhi proses pengambilan keputusan

Auditor dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dituntut untuk independen demi kepentingan semua pihak yang terkait. Auditor berkewajiban untuk jujur kepada internal dan juga pihak eksternal yang menaruh kepercayaan pada laporan keuangan auditan. Independensi auditor penting untuk dipertahankan, karena apabila sampai pihak yang berkepentingan tidak percaya pada hasil auditan dari auditor maka pihak klien maupun pihak ketiga tidak akan meminta jasa dari auditor itu lagi (Wiratama dan Budiartha, 2015).

Auditor yang memiliki independensi tinggi dapat menyusun program *audit* yang bebas dari campur tangan pimpinan untuk menentukan, mengeliminasi atau memodifikasi bagian-bagian tertentu yang diperiksa sehingga *audit* yang dilakukan menjadikan SPAP sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan laporan. Oleh karena itu, pelaksanaan *audit* yang dilakukan sesuai dengan standar *audit* sehingga kualitas laporan hasil pemeriksaan memuat laporan pemeriksaan yang akurat, lengkap, dan objektif sehingga kualitas *audit* yang dihasilkan semakin meningkat.

Pengaruh Independensi..., Metta Sari Santoso, FB UMN, 2018

Penelitian Sukriah, *et al*. (2009) dan Kisnawati (2012) dalam Oklivia dan Marlinah (2014) berpendapat bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas *audit*. Sedangkan menurut Harsanti dan Whetyningtyas (2014) menyatakan bahwa independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas *audit*. Semakin tinggi independensi seorang auditor maka kualitas *audit* yang diberikannya semakin baik (Oklivia dan Marlinah, 2014). Pentingnya independensi dalam menghasilkan kualitas *audit* mengharuskan auditor memiliki dan mempertahankan sikap independensi dalam melaksanakan tugasnya. Auditor juga harus mempertahakan sikap independen karena opini yang dikeluarkannya bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan manajemen. Jika auditor tidak independen maka kualitas *audit* yang dihasilkan tidak baik (Fietoria dan Manalu, 2016).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiratama dan Budiartha (2015), dan Utami (2015), dibuktikan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas *audit*. Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha_1: Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas *audit*.

2.4 Objektivitas

Selain independensi, faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kualitas *audit* adalah objektivitas. Menurut Mulyadi (2010) dalam Nainggolan dan Abdullah (2016), objektivitas adalah sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor dalam melakukan *audit* dan auditor tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh pihak lain.

Pengaruh Independensi..., Metta Sari Santoso, FB UMN, 2018

Objektivitas mengharuskan auditor untuk membuat penilaian *audit* yang berisi bukan hanya menyetujui dengan sikap diam untuk keinginan klien (Bamber dan Iyer, 2007) dalam (Oklivia dan Marlinah, 2014). Prinsip objektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya (Rusdiana dan Saptaji, 2018).

PMK No.154/PMK.01/2017 Pasal 38 menyatakan bahwa (1) Dalam memberikan jasa asurans, akuntan publik dan KAP wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan. (2) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit, apabila:

a. Akuntan publik atau pihak terasosiasi mempunyai kepentingan keuangan atau memiliki kendali yang signifikan pada klien atau memperoleh manfaat ekonomis dari klien dengan cara:
    1. Memiliki investasi baik secara langsung maupun tidak langsung di klien
    2. Memiliki kepemilikan bersama dengan klien
    3. Memiliki hubungan usaha yang material dengan klien
    4. Merangkap sebagai:
        i. Pimpinan, direksi, pengurus
        ii. Orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan dan/atau akuntansi di klien

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

b. Akuntan publik atau pihak terasosiasi memiliki hubungan kekeluargaan dengan pimpinan, direksi, pengurus, atau orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan dan/atau akuntansi pada klien, berupa suami, istri, anak, orang tua, atau saudara kandung
c. Akuntan publik memberikan jasa asurans dan jasa non-asurans dalam periode atau tahun buku yang sama

Menurut Tuanakotta (2015), faktor-faktor yang relevan dalam proses penyelesaian konflik (*conflict resolution process*) semacam ini, baik formal maupun informal antara lain:

1. Fakta-fakta yang relevan
2. Butir-butir etika yang dipermasalahkan
3. Potensi pelanggaran terhadap prinsip dasar yang mana
4. Apa prosedur internal yang ada untuk konflik seperti ini
5. Tindakan apa saja yang bisa diambil

Menurut Wibowo (2006) dalam Nainggolan dan Abdullah (2016), auditor menunjukkan objektivitas profesional pada tingkat tertinggi ketika mengumpulkan, mengevaluasi, dan melaporkan informasi kegiatan atau proses yang sedang diuji, dimana auditor dalam melakukan penilaian asersi seimbang atas semua kondisi yang relevan serta tidak terpengaruh oleh kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain dalam membuat keputusannya. Setiap praktisi harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi setiap situasi yang dapat menimbulkan

Pengaruh Independensi..., Metta Sari Santoso, FB UMN, 2018

benturan kepentingan, karena situasi tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Sebagai contoh, ancaman terhadap objektivitas dapat terjadi ketika praktisi bersaing secara langsung dengan klien atau memiliki kerjasama usaha atau kerjasama sejenis lainnya dengan pesaing utama klien. Ancaman terhadap objektivitas atau kerahasiaan dapat terjadi ketika praktisi memberikan jasa profesional untuk klien-klien yang kepentingannya saling berbenturan atau kepada klien-klien yang sedang saling berselisih dalam suatu masalah atau transaksi (Kode Etik Profesi Akuntan Publik, seksi 220.1).

Auditor yang memiliki objektivitas tinggi dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil pemeriksaan sehingga dapat mengungkapkan kondisi sesuai fakta. Maka pekerjaan yang dilakukan akan didasarkan pada kode etik yang ditetapkan yang sesuai dengan standar *audit* sehingga kualitas laporan hasil pemeriksaan memuat temuan dan simpulan hasil pemeriksaan secara objektif sehingga kualitas *audit* yang dihasilkan semakin meningkat.

Penelitian Nainggolan dan Abdullah (2016) menyatakan bahwa objektivitas tidak berpengaruh terhadap kualitas *audit*. Sedangkan penelitian Sukriah, *et al*. (2009), Ayuningtyas dan Pramudji (2012), Iyer dan Banber (2007), serta Mabruri dan Winarna (2010) dalam Oklivia dan Marlinah (2014) menyatakan bahwa objektivitas mempunyai pengaruh terhadap kualitas *audit*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi objektivitas maka semakin baik kualitas auditnya. Dari hasil penelitian yang

Pengaruh Independensi..., Metta Sari Santoso, FB UMN, 2018

dilakukan oleh Oklivia dan Marlinah (2014) dibuktikan bahwa objektivitas berpengaruh terhadap kualitas *audit*. Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha_2: Objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas *audit*.

2.5 Akuntabilitas

Selain independensi dan objektivitas, akuntabilitas juga dapat mempengaruhi kualitas *audit.* Tetclock (2007) dalam Furiady dan Kurnia (2015) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggung jawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya.

Akuntabilitas merupakan wujud kewajiban seseorang untuk mempertanggung-jawabkan pengelolaan atas kewenangan yang dipercayakan kepadanya guna pencapaian tujuan yang ditetapkan. Seorang akuntan publik wajib untuk menjaga perilaku etis mereka kepada profesi, masyarakat, dan pribadi mereka sendiri agar senantiasa bertanggung jawab untuk menjadi kompeten dan berusaha obyektif dan menjaga integritas sebagai akuntan publik (Bawono dan Singgih, 2010) dalam (Wiratama dan Budiartha, 2015).

Menurut SA 200 (2017), akuntan publik dalam menjalankan profesinya sebagai auditor harus mentaati aturan etika profesi. Prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh auditor menurut kode etik adalah sebagai berikut:

a) Integritas

b) Objektivitas

c) Kompetensi dan kecermatan profesional

d) Kerahasiaan

e) Perilaku profesional

Rusdiana dan Saptaji (2018) menyebutkan lima prinsip dasar etika profesi, yaitu sebagai berikut:

a. Integritas

Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk bersikap tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Praktisi tidak boleh memberikan laporan, komunikasi atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat:

1. Kesalahan material atau pernyataan yang menyesatkan
2. Pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati
3. Penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan

b. Objektivitas

Prinsip objektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisya.

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

c. Kompetensi

Prinsip kompetensi, sikap kecermatan, dan kehati-hatian profesional mewajibkan setiap praktisi untuk:

1. Memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja
2. Menggunakan kemahiran profesionalnya dengan saksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

d. Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap praktisi untuk tidak melakukan tindakan-tindakan berikut:

1. Pengungkapan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di KAP atau jaringan KAP tempatnya bekerja tanpa wewenang khusus kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku
2. Penggunaan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga
3. Pengungkapan informasi yang bersifat rahasia atau ketika pengungkapan tersebut dianggap tepat

Pengaruh Independensi..., Metta Sari Santoso, FB UMN, 2018

4. Pengungkapan yang diperbolehkan oleh hukum dan disetujui oleh klien atau pemberi kerja; pengungkapan yang diharuskan oleh hukum
5. Pengungkapan dokumen atau bukti lainnya dalam sidang pengadilan
6. Pengungkapan kepada otoritas publik yang tepat mengenai suatu pelanggaran hukum
7. Pengungkapan yang terkait dengan kewajiban profesional selama tidak dilarang oleh ketentuan hukum dalam hal berikut:
    i. Mematuhi pelaksanaan penelaahan mutu yang dilakukan oleh organisasi profesi atau regulator
    ii. Menjawab pertanyaan atau investigasi yang dilakukan oleh organisasi profesi atau regulator
    iii. Melindungi kepentingan profesional praktisi dalam sidang pengadilan
    iv. Mematuhi standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku

Dalam memutuskan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia, setiap praktisi harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Memperhatikan kepentingan semua pihak, termasuk pihak ketiga, jika klien atau pemberi kerja mengizinkan pengungkapan informasi oleh praktisi
2. Memperhatikan informasi yang relevan. Jika fakta atau kesimpulan tidak didukung bukti atau informasi tidak lengkap, harus

menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan jenis pengungkapan yang harus dilakukan

3. Penggunaan komunikasi yang diharapkan sehingga tepat tidaknya pihak yang dituju dalam komunikasi dapat dipastikan

e. Perilaku

Kode etik profesi akuntan publik juga memperinci aturan mengenai hal-hal berikut:

1. Seksi 200 Ancaman dan Pencegahan, Seksi 210 Penunjukkan Praktisi, KAP, atau Jaringan KAP.
2. Seksi 220 Benturan Kepentingan, Seksi 230 Pendapat Kedua, Seksi 240 Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk Remunerasi Lainnya.
3. Seksi 250 Pemasaran Jasa Profesional, Seksi 260 Penerimaan Hadiah atau Bentuk Keramah-Tamahan Lainnya.
4. Seksi 270 Penyimpanan Aset Milik Klien, Seksi 280 Objektivitas - Semua Jasa Profesional.
5. Seksi 290 Independensi dalam Perikatan *Assurance*.

Libby dan Luft (1993), Cloyd (1997), dan Tan dan Alison (1999) dalam Bustami (2013) melihat ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas individu. Pertama, seberapa besar motivasi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kedua, seberapa besar usaha atau daya pikir yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Ketiga, seberapa besar keyakinan mereka bahwa

pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan. Dibawah ini akan dijelaskan masing-masing ketiga hal tersebut:

a. Seberapa besar motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan

   Motivasi secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas seseorang, orang dengan akuntabilitas tinggi juga memiliki motivasi tinggi dalam mengerjakan sesuatu.

b. Seberapa besar usaha atau daya pikir untuk menyelesaikan pekerjaan

   Orang dengan akuntabilitas tinggi mencurahkan usaha (daya pikir) yang lebih besar dibanding orang dengan akuntabilitas rendah ketika menyelesaikan pekerjaan. Dengan rasa akuntabilitasnya yang tinggi itu, seseorang akan menggunakan kemampuannya secara maksimal agar dapat memperoleh hasil yang baik pula dari pekerjaannya tersebut. Jika dikaitkan dengan kualitas *audit*, auditor yang memiliki akuntabilitas tinggi dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, dan dapat menyelesaikannya secara tepat waktu.

c. Seberapa yakin pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan

   Keyakinan bahwa sebuah pekerjaan akan diperiksa atau dinilai orang lain dapat meningkatkan keinginan dan usaha seseorang untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas. Seseorang dengan akuntabilitas tinggi memiliki keyakinan yang

Pengaruh Independensi..., Metta Sari Santoso, FB UMN, 2018

lebih tinggi bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh *supervisor* / manajer / pimpinan dibandingkan dengan seseorang yang memiliki akuntabilitas rendah.

Rasa tanggung jawab atau akuntabilitas merupakan suatu keadaan yang dirasakan oleh auditor bahwa pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan standar akuntan publik sehingga dapat dipertanggung jawabkan mengenai kesimpulan yang dibuat untuk pihak - pihak yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung (Supardi dan Mutakin, 2008) dalam (Alfatih, 2015). Messier dan Quilliam (2012) dalam Hafizh (2017) mengungkapkan bahwa akuntabilitas yang dimiliki auditor dapat meningkatkan proses kognitif auditor dalam mengambil keputusan.

Auditor yang memiliki akuntabilitas tinggi memiliki motivasi untuk berbuat yang terbaik dalam melaksanakan kewajibannya sehingga akuntan publik dalam menjalankan profesinya sebagai auditor menaati aturan etika profesi. Oleh karena itu pelaksanaan *audit* dilakukan sesuai dengan standar *audit* sehingga kualitas laporan hasil pemeriksaan memuat laporan pemeriksaan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu sehingga kualitas *audit* yang dihasilkan semakin meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan dan Abdullah (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas auditor berpengaruh terhadap kualitas *audit*. Diani dan Ria (2007) dalam Wiratama dan Budiartha (2015) menyebutkan tanggung jawab (akuntabilitas) auditor dalam melaksanakan *audit* akan mempengaruhi kualitas *audit* yang dihasilkan. Akuntan yang memiliki kesadaran akan pentingnya peranan akuntan

Pengaruh Independensi..., Metta Sari Santoso, FB UMN, 2018

bagi profesi dan masyarakat, ia akan melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiratama dan Budiartha (2015) dan Nainggolan dan Abdullah (2016), dibuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas *audit*. Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha_3: akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas *audit*.

2.6 *Due Professional Care*

Kualitas *audit* juga dapat dipengaruhi oleh *due professional care.* Menurut Wiratama dan Budiartha (2015), *due professional care* dapat diartikan sebagai sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti *audit*, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan, dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab. SA 500 (2017) menyatakan bahwa bukti *audit* merupakan informasi yang digunakan oleh auditor dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini auditor. Bukti *audit* mencakup baik informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan maupun informasi lainnya. Bukti *audit* dianggap berkualitas jika bukti tersebut relevan dan andal dalam mendukung kesimpulan yang dijadikan basis opini auditor. Auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur *audit* yang tepat dan sesuai dengan kondisi untuk memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat. Pada waktu merancang dan melaksanakan prosedur *audit*, auditor harus

Pengaruh Independensi..., Metta Sari Santoso, FB UMN, 2018

mempertimbangkan relevansi dan keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti *audit*. Jika informasi yang digunakan sebagai bukti *audit* telah disusun dengan menggunakan pekerjaan pakar manajemen, auditor, sejauh diperlukan, harus mempertimbangkan signifikansi pekerjaan pakar tersebut untuk tujuan auditor dengan:

1. Mengevaluasi kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar tersebut
2. Memperoleh pemahaman atas pekerjaan pakar
3. Mengevaluasi kesesuaian pekerjaan pakar tersebut sebagai bukti *audit* untuk asersi yang relevan

Menurut SA 500 (2017), pada waktu menggunakan informasi yang dihasilkan oleh suatu entitas, auditor harus mengevaluasi apakah informasi tersebut andal untuk tujuan auditor termasuk, jika relevan, dalam situasi untuk:

1. Memperoleh bukti *audit* tentang akurasi dan kelengkapan informasi
2. Mengevaluasi apakah informasi tersebut cukup tepat dan rinci untuk memenuhi tujuan auditor

Heri (2016) menyatakan bahwa secara umum, keandalan bukti *audit* sangat tergantung pada:

1. Independensi penyedia bukti

   Bukti yang diperoleh dari pihak ketiga atau pihak yang berada di luar klien (bukti eksternal) tentu saja lebih dapat diandalkan dibanding dengan bukti yang berasal dari atau yang dibuat oleh klien sendiri (bukti internal).

Pengaruh Independensi..., Metta Sari Santoso, FB UMN, 2018

2. Efektivitas pengendalian internal klien

   Bukti *audit* akan menjadi lebih dapat diandalkan jika pengendalian internal diterapkan secara efektif oleh klien.

3. Perolehan secara langsung oleh auditor

   Bukti *audit* yang diperoleh secara langsung oleh auditor melalui pemeriksaan fisik, pengamatan, penghitungan ulang, dan inspeksi akan lebih dapat diandalkan dibanding dengan bukti *audit* yang diperoleh secara tidak langsung.

4. Kualifikasi penyedia informasi dan juga auditor

   Meskipun penyedia informasi adalah pihak yang independen, namun bukti *audit* akan menjadi tidak dapat diandalkan jika penyedia informasi tersebut tidak memiliki pemahaman mengenai arti pentingnya bukti tersebut.

5. Objektivitas

   Bukti yang objektif lebih dapat diandalkan dibanding dengan bukti yang memerlukan pertimbangan tertentu.

6. Ketepatan waktu

   Ketepatan waktu bukti *audit* berkaitan dengan kapan bukti tersebut dikumpulkan serta bagaimana menentukan tanggal sampel. Untuk akun-akun laporan posisi keuangan, ketepatan waktu bukti *audit* berkaitan dengan kapan bukti tersebut dikumpulkan, sedangkan untuk akun-akun laba rugi

Pengaruh Independensi..., Metta Sari Santoso, FB UMN, 2018

komprehensif, ketepatan waktu bukti *audit* berkaitan dengan pemilihan tanggal sampel atau penentuan bagian periode yang akan diaudit.

Kecermatan mengharuskan auditor untuk waspada terhadap resiko yang signifikan. Dengan sikap cermat, auditor akan mampu mengungkap berbagai macam kecurangan dalam penyajian laporan keuangan lebih mudah dan cepat. Untuk itu dalam mengevaluasi bukti *audit*, auditor dituntut untuk memiliki keyakinan yang memadai (Wiratama dan Budiartha, 2015). Singgih dan Bawono (2010) dalam Sari (2015) mendefinisikan *due professional care* sebagai kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional yang menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional. Seorang auditor harus memiliki tingkat keterampilan yang umumnya dimiliki oleh auditor dan harus menggunakan keterampilan tersebut dengan kecermatan dan keseksamaan yang wajar.

Menurut Singgih dan Bawono (2010) dalam Sari (2015) sikap *due professional care* dapat dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu:

1. Aspek struktural

   Merupakan bagian dari pelatihan-pelatihan, asosiasi profesional, dan kode etik profesi.

2. Aspek sikap

   Berkaitan dengan sikap yang menyeimbangkan antara sikap curiga dan sikap percaya serta pembentukan jiwa profesionalisme auditor.

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Menurut Heri (2016), skeptisme profesional adalah suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, dan selalu waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan adanya kemungkinan salah saji, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, serta meliputi sikap kritis dalam melakukan penilaian atas bukti *audit*. Skeptisme profesional terdiri atas dua komponen utama, yaitu:

1. Suatu pikiran yang selalu mempertanyakan
2. Sikap waspada atau kritis dalam menilai bukti *audit*

Menurut SA Seksi 230.1 (2011), penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional. Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti *audit*. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama, dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti *audit* secara objektif. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Keyakinan mutlak tidak dapat dicapai karena sifat bukti *audit* dan karakteristik kecurangan tersebut. Oleh karena itu, suatu *audit* yang dilaksanakan berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia mungkin tidak dapat mendeteksi salah saji material (SPAP, 2011).

Pengaruh Independensi..., Metta Sari Santoso, FB UMN, 2018

Berdasarkan SA 240 (2017) auditor harus mempertahankan skeptisme profesional sepanjang *audit*, menyadari kemungkinan bahwa kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan dapat terjadi, walaupun pengalaman masa lalu auditor menunjukkan adanya kejujuran dan integritas, manajemen entitas dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Untuk mempertahankan skeptisme profesional diperlukan pengajuan pertanyaan secara berkelanjutan tentang apakah informasi dan bukti *audit* yang telah diperoleh memberi petunjuk bahwa kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan mungkin terjadi. Hal tersebut meliputi mempertimbangkan keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti *audit* dan pengendalian atas penyiapan dan pemeliharaannya, jika relevan. Oleh karena karakteristik kecurangan tersebut, sikap skeptisme profesional auditor adalah penting terutama ketika mempertimbangkan risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan (IAPI, 2017).

Heri (2016) juga menyatakan bahwa mempertahankan skeptisme profesional selama *audit* berlangsung diperlukan untuk mengurangi risiko:

1. Kegagalan dalam mengidentifikasi kondisi-kondisi yang tidak lazim
2. Terlalu menyamaratakan kesimpulan yang dibuat berdasarkan hasil observasi *audit*
3. Menggunkan asumsi yang tidak tepat dalam menentukan sifat, saat, dan luas prosedur *audit*

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan (Wulan dan Primasari, 2013).

Kemahiran profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional sehingga memiliki sikap tidak mudah percaya terhadap pernyataan klien selama melakukan *audit*. Maka auditor akan berusaha mengumpulkan bukti yang cukup sesuai dengan standar *audit* serta melakukan pengujian bukti secara maksimal agar dapat mendukung kesimpulan yang diambil sehingga kualitas laporan hasil pemeriksaan memuat temuan dan simpulan hasil pemeriksaan secara objektif sehingga kualitas *audit* yang dihasilkan semakin meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulan dan Primasari (2013) menyatakan bahwa *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas *audit*. Louwers, *et al*. (2008) dalam Wiratama dan Budiartha (2015) mengungkapkan auditor yang kurang menggunakan sikap skeptis dan *due professional care* cenderung gagal dalam mengungkapkan *fraud* dalam penyajian laporan keuangan perusahaan. Penggunaan *due professional care* dengan seksama dan cermat akan memberikan keyakinan yang memadai pada auditor untuk memberikan opini bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan ataupun kekeliruan. Semakin baik penggunaan *due professional care* auditor memungkinkan hasil *audit* yang lebih baik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilasita Sujana, dan Musmini (2014) dibuktikan bahwa *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas *audit*. Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha_4: *Due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas *audit*.

2.7 Pengalaman kerja

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kualitas *audit* adalah pengalaman kerja. Bawono dan Singgih (2011) dalam Oklivia dan Marlinah (2014) menyatakan bahwa pengalaman merupakan proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi betingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non-formal. Paragraf ketiga SA seksi 210 menyebutkan: "Dalam melaksanakan *audit* untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan *auditing"* (Wiratama dan Budiartha, 2015). Pengalaman auditor adalah tingkat pengetahuan auditor yang diperoleh dari kurun waktu yang panjang dan menambah serta memperluas pengetahuannya dalam menghadapi hal yang material (Hasibuan, 2010) dalam (Fietoria dan Manalu, 2016).

Heri (2016) menyatakan bahwa auditor harus menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam merencanakan dan melaksanakan *audit* atas laporan keuangan. Pertimbangan profesional disini merupakan sesuatu yang penting untuk melakukan *audit* secara tepat. Hal ini karena bahwa dalam pengauditan sangat dibutuhkan penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fakta dan kondisi terkait. Karakteristik pertimbangan profesional yang diharapkan dari seorang auditor

Pengaruh Independensi..., Metta Sari Santoso, FB UMN, 2018

adalah pertimbangan profesional yang wajar, yang dibuat berdasarkan kompetensi, pengetahuan, dan pengalamannya. Pertimbangan profesional tersebut perlu dilakukan sepanjang *audit* berlangsung. Auditor yang berpengalaman mampu mengingat lebih banyak kekeliruan dan lebih sedikit jumlah kesalahan yang dilakukan, serta auditor yang berpengalaman memiliki kemampuan mengingat lebih banyak kekeliruan yang tidak lazim (Wulan dan Primasari, 2013).

Menurut Wandita, Yuniarta, dan Darmawan (2014), untuk mencapai *audit* yang berkualitas dibutuhkan juga pengetahuan. Pengetahuan sangat penting untuk dimiliki oleh seorang auditor, terlebih pengetahuan dalam bidang akuntansi dan *auditing*. Pengetahuan merupakan dasar yang penting yang menjadi modal selama bekerja sebagai seorang akuntan, terlebih pada saat melaksanakan suatu *audit* atas laporan keuangan. Pengetahuan *audit* bisa diperoleh dari berbagai pelatihan formal ataupun dari pengalaman khusus, yang berupa kegiatan seminar, loka karya, serta pengarahan dari auditor senior kepada auditor juniornya. Pengetahuan disini juga bisa diperoleh dari frekuensi seorang akuntan publik dalam melakukan suatu pekerjaan dalam proses pengauditan suatu laporan keuangan.

Pengalaman seseorang ditunjukkan dengan telah dilakukannya berbagai pekerjaan atau lamanya seseorang dalam bekerja untuk mendapatkan ilmu yang sebenarnya selain dari pendidikan formal. Semakin lama masa kerja dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor maka akan semakin baik dan kualitas *audit* yang dihasilkan akan semakin baik. Auditor yang berpengalaman lebih memiliki ketelitian dan

Pengaruh Independensi..., Metta Sari Santoso, FB UMN, 2018

kemampuan yang baik dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas *audit* (Fietoria dan Manalu, 2016).

Tubbs (1992) dalam Hafizh (2017) mengatakan bahwa auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan diantaranya dalam hal:

1. Mendeteksi kesalahan
2. Memahami kesalahan secara akurat
3. Mencari penyebab kesalahan

Melalui keunggulan tersebut akan bermanfaat bagi klien untuk melakukan perbaikan-perbaikan, dengan demikian akan memberi kepuasan bagi auditan. Menurut Libby dan Trotman dalam jurnal maksi Vol 1 (2002:5) dalam Hafizh (2017), seorang auditor profesional harus mempunyai pengalaman yang cukup tentang tugas dan tanggung jawabnya. Pengalaman auditor akan menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam mengambil keputusan dalam tugasnya.

Pengetahuan auditor akan semakin berkembang seiring bertambahnya pengalaman melakukan tugas *audit* (Wiratama dan Budhiarta, 2015). Pengalaman kerja seseorang dapat mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Semakin tinggi tingkat pengalaman seseorang maka hasil pekerjaan yang dihasilkan akan semakin bagus. Hal ini dapat dijadikan rekomendasi bahwa semakin lama masa kerja yang

Pengaruh Independensi..., Metta Sari Santoso, FB UMN, 2018

dimiliki oleh seorang auditor maka mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan (Masrizal, 2010) dalam (Putra, Sujana, dan Adiputra , 2015).

Pengalaman juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan *audit* sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman kerja seorang auditor maka semakin meningkat kualitas hasil auditnya (Hafizh, 2017).

Auditor dalam melakukan pemeriksaan memiliki keahlian dalam bidangnya dan telah menjalani pelatihan teknis yang cukup sehingga dapat menyelesaikan tugas *audit* yang diberikan sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Maka auditor saat menerima penugasan akan menetapkan sasaran, ruang lingkup dan metodologi pemeriksaan sesuai dengan standar *audit* sehingga kualitas laporan hasil pemeriksaan memuat laporan pemeriksaan yang mengungkapkan hal-hal yang merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan sampai berakhirnya pemeriksaan sehingga kualitas *audit* yang dihasilkan semakin meningkat.

Penelitian Bawono dan Singgih (2011) serta Badjuri (2011) dalam Oklivia dan Marlinah (2014) menyatakan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas *audit*. Sedangkan penelitian Wiratama dan Budiartha (2015) menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas *audit*. Terdapat hubungan searah antara pengalaman dengan pelaksanaan kualitas *audit*,

Pengaruh Independensi..., Metta Sari Santoso, FB UMN, 2018

yang berarti semakin banyak pengalaman auditor akan semakin baik kualitas *audit* yang dihasilkan. Pelatihan seorang auditor juga mencakup kesadaran untuk terus-menerus mengikuti perkembangan dalam bisnis dan profesinya guna meningkatkan kualitas auditnya (SPAP:2011) dalam (Wiratama dan Budiartha, 2015).

Dari hasil penelitian yang dilakukan Wandita, Yuniarta, dan Darmawan (2014), dan Wiratama dan Budiartha (2015), dibuktikan bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas *audit*. Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha_5: Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas *audit*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wiratama dan Budiartha (2015) dalam "pengaruh independensi, pengalaman kerja, *due professional care*, dan akuntabilitas terhadap kualitas *audit*", hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independensi, pengalaman kerja, *due professional care*, dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan pada variabel kualitas *audit*. Penelitian yang dilakukan oleh Wulan dan Primasari (2013), terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel pengalaman, independensi, dan *due professional care* terhadap kualitas *audit*. Selain itu, berdasarkan penelitian Nainggolan dan Abdullah (2016), ada pengaruh akuntabilitas auditor, objektivitas auditor secara bersamaan terhadap kualitas *audit*. Berdasarkan penelitian Fietoria dan Manalu (2016), independensi dan pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas *audit*.

Pengaruh Independensi..., Metta Sari Santoso, FB UMN, 2018

2.8 Model Penelitian

Gambar 2.1

Model Penelitian

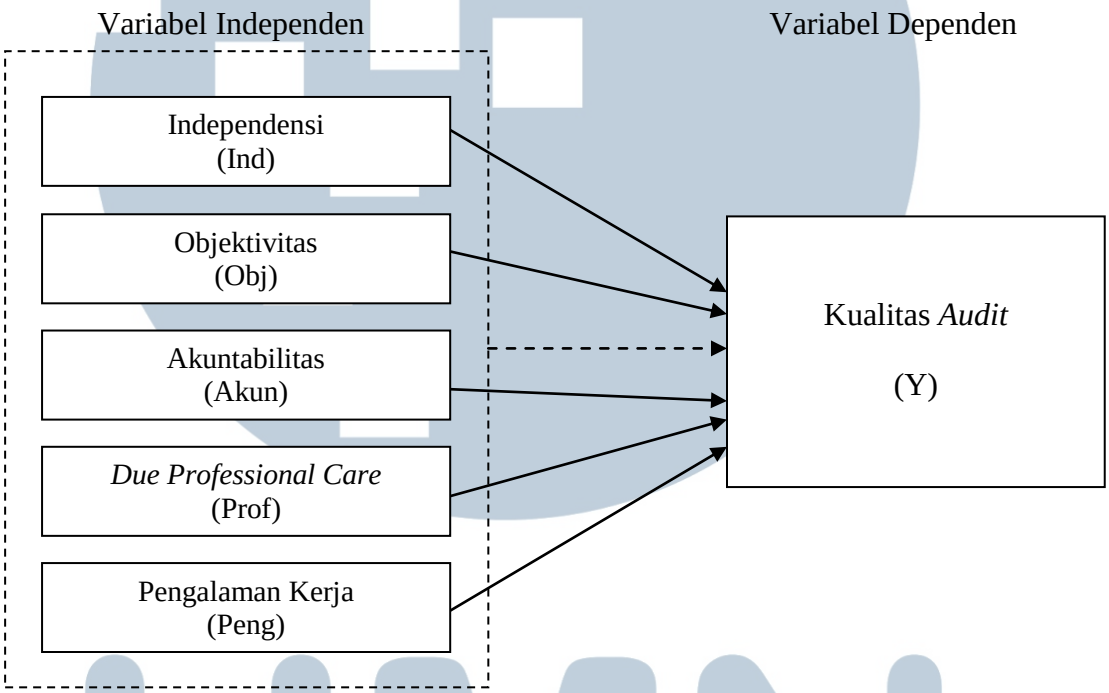

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA